

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diutarakan dalam pembahasan ini yaitu :

1. Pengaturan sanksi tindak kekerasan seksual terhadap anak terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturannya terdapat dalam KUHP dan beberapa undang-undang diantaranya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan beberapa perubahannya dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Dalam berbagai pengaturan tersebut memuat mengenai sanksi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dalam KUHP tidak ada ancaman minimum khususnya. Dalam undang-undang perlindungan anak ancaman pidana selalu mengalami perubahan. Perubahan terakhir yaitu yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam undang-undang ini telah terdapat pembaharuan hukum dimana ada ancaman kebiri terhadap pelaku. Sanksi kebiri merupakan suatu sistem pembaharuan pemidanaan di Indonesia.
2. Setelah menganalisis rumusan Rancangan KUHP tahun 2015 dan tahun 2018 terdapat Formulasi pengaturan sanksi dalam RKUHP yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan sanksi dilakukan sesuai dengan perkembangan keadaan dan perubahan situasi keadaan masyarakat. Pembuat undang-undang masih berupaya untuk melakukan penyempurnaan untuk

menghasilkan KHUP Nasional yang bisa mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat.

B. Saran

Pada akhir tesis ini penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah selaku pembuat peraturan perundangan yang bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat selaku legislatif yang mengkaji dan mengesahkan peraturan perundang-undangan agar Pasal-pasal yang berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan seksual dalam rancangan KUHP diperberat lagi ancaman pidananya, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah memasukkan ancaman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
2. Agar aparat penegak hukum, yang merupakan sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana terpadu, melakukan tugas-tugas dengan baik dalam hal menegakkan hukum dalam usaha upaya menanggulangi tindak kekerasan seksual. Aparat penegak hukum supaya menjalankan roda sistem peradilan pidana yang tegas dalam melakukan penuntutan dan menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada pelaku sebagaimana sanksi minimal dan maksimal yang telah termuat dalam ketentuan undang-undang tersebut yang sesuai dengan kondisi dari perbuatan pelaku.